



RENCANA KERJA (RENJA) DPMPTSP KABUPATEN JEPARA 2024



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA
2023**

KATA PENGANTAR

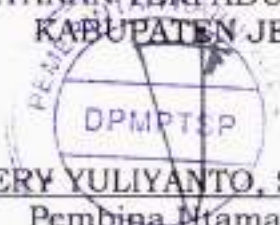
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan *Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024. Tujuan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 yang diuraikan secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 ini, diharapkan DPMPTSP sebagai salah satu unsur penunjang penyelenggara pemerintahan negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara ini secara umum belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk terbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan gambaran Rencana Kerja Tahun 2024. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Renja ini.

Jepara, 20 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



HERY YULIYANTO, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770702 199602 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.....	11
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP.....	37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	49
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.....	53
3.3 Inovasi Perangkat daerah.....	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	55
4.1 Program dan Kegiatan.....	55
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Catatan Penting.....	70
5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan.....	70
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja DPMPTSP.....	12
Tabel 2.2	Capaian Program dan Kegiatan Bidang PTSP.....	12
Tabel 2.3	Capaian Program dan Kegiatan Bidang Penanaman Modal...	14
Tabel 2.4	Capaian Program dan Kegiatan Sekretariat.....	16
Tabel 2.5	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021.....	23
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	36
Tabel 2.7	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP.....	41
Tabel 2.8	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	48
Tabel 3.1	Sinkronisasi Prioritas Nasional, Propinsi Jawa Tengah dengan DPMPTSP.....	52
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renja.....	53
Tabel 4.1	Keterkaitan Kerangka Program DPMPTSP dengan Sasaran Daerah.....	56
Tabel 4.2	Rencana Kerja DPMPTSP.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Mengacu dari Permendagri No. 86 Tahun 2017, dimana setiap OPD diwajibkan menyusun Renja OPD merujuk pada dokumen Renstra OPD, Rancangan RKPD Kota/Kabupaten, serta melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra OPD dan RKPD.

Tahapan penyusunan Renja mengikuti alur: (i) persiapan penyusunan; (ii) Penyusunan rancangan awal; (iii) penyusunan rancangan; (iv) Pelaksanaan Forum OPD atau Lintas OPD; (v) Perumusan rancangan akhir; (v) Penetapan Renja. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Maret. Rancangan Renja disampaikan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten untuk diverifikasi disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret selaras dengan rancangan awal RKPD. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja, berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan dari Bappeda. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah, kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan verifikasi, paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA. Proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Hal ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif

Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara mengampu urusan Penanaman Modal. Oleh karena itu wajib menyusun Rencana Kerja yang sinergis dengan RKPD tahun 2024.

Kemudian, susunan, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara didasarkan pada Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 80) adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Hubungan Renja dengan dokumen lainnya tergambar dalam pictograph dibawah ini sebagai berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara disusun dengan berlandaskan peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi, pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005 - 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;

8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026;
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026.
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 15;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di urusan penanaman modal.
- b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;

2. Tujuan

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Jepara tahun 2024.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
- c. Bahan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

1.4. Sistematika

Bab I PENDAHULUAN

Berisi tentang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen lainnya, landasan hukum dan maksud serta tujuan penyusunan Renja.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi (1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; (2) Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dari usulan program/kegiatan pada tahun 2024 (3) program dan kegiatan, yang disertai penjelasan tentang (a) Faktor-faktor bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; (b) garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: (i) Jumlah program dan jumlah kegiatan. (ii) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan; (iii) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya; (c) Penjelasan penyesuaian jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

Bab V PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara mendukung pencapaian Misi ke-3 “Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri” dengan arah kebijakan “Penguatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera”.

Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara tahun 2022 mengacu pada tugas dan fungsi beserta kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara adalah :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ini menyajikan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jepara

No.	Uraian	Keterangan
1	Nilai Realisasi Investasi	IKU

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara pada tahun 2022 melaksanakan 6 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PTSP
TAHUN 2021 DAN 2022

NO	JENIS KEGIATAN	TH. N-3 (2021)	TH.N-2 (2022)	
			Target	Realisasi
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- 1 kali fasilitasi perizinan	- 10 kali fasilitasi perizinan	- 10 kali fasilitasi perizinan
		- 1 kali Focus Group Discusion (FGD)	- 1 kali FGD PMA, PMDN	- 1 kali FGD PMA, PMDN
		- 5 investor terfasilitasi	- 5 investor terfasilitasi	- 5 investor terfasilitasi
		- 1 kali machmaking	- 1 kali kerjasama/ matchmaking UMKM, pengusahan besar, perbangkan	- 1 kali kerjasama/ matchmaking UMKM, pengusahan besar, perbangkan
2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	- 38 kali rapat perizinan usaha	- 30 kali rapat perizinan usaha	- 33 kali rapat perizinan usaha

		- 44 kali cheking perizinan usaha	- 44 kali cheking perizinan usaha	- 44 kali cheking perizinan usaha
		- 37 kali rapat perizinan dasar	- 30 kali rapat perizinan dasar	- 31 kali rapat perizinan dasar
		- 44 kali cheking perizinan dasar	- 45 kali cheking perizinan dasar	- 45 kali cheking perizinan dasar
		- 3 kali bintek	- 7 kali gerai layanan di kecamatan	- 11 kali gerai layanan di kecamatan
3	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		- 1 aplikasi	- 1 aplikasi

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melaksanakan 3 program dengan 3 kegiatan yaitu **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** dengan kegiatan (1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. **Program Pelayanan Penanaman Modal** dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Program dan kegiatan tersebut bertujuan mendukung pencapaian sasaran daerah " Nilai Realisasi Investasi ". Dan dimaksudkan untuk meningkatkan realisasi investai PMDN maupun PMA yang ada di Jepara. Program dan kegiatan ini untuk mencapai indikator kinerja nilai realisasi investasi PMDN, Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti serta Nilai realisasi investasi PMA.

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Telah mencapai tolok ukur keberhasilan yaitu 10 kali fasilitasi perizinan, melaksanakan 1 kali FGD PMA, PMDN, 5 investor terfasilitasi, melaksanakan 1 kali kerjasama/ matchmaking UMKM pengusaha besar, perbankan, 33 kali rapat perizinan usaha , 44 kali cheking perizinan usaha, 31 kali rapat perizinan dasar, 45 kali cheking perizinan dasar, 11 kali gerai layanan di kecamatan, pemeliharaan dan up grade aplikasi.

Faktor faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

1. Adanya sinergitas, koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pelaku usaha dengan DPMPTSP Kabupaten Jepara dalam memfasilitasi perizinan dengan pelaku UMKM.
2. Meningkatnya kesadaran para pelaku usaha akan arti pentingnya legalitas usaha.
3. Pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dengan sistem jemput bola ke kecamatan dan desa.

Tabel 2.3
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BIDANG PENANAMAN MODAL TAHUN 2021 DAN 2022

NO	JENIS KEGIATAN	TH. N-3 (2021)	TH.N-2 (2022)	
			Target	Realisasi
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 kali fasilitasi perizinan, 1 kali machmaking kerjasama, 1 kali Focus Group Discusion (FGD), 5 investor terfasilitasi	- 10 kali fasilitasi perizinan	- 10 kali fasilitasi perizinan
			- 1 kali FGD PMA, PMDN	- 1 kali FGD PMA, PMDN
			- 5 investor terfasilitasi	- 5 investor terfasilitasi
			- 1 kali kerjasama/ matchmaking UMKM, pengusahan besar, perbangkan	- 1 kali kerjasama/ matchmaking UMKM, pengusahan besar, perbangkan
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	- 1 dokumen review RUPM	- 1 dokumen review RUPM
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- 90 buku profil DPMPTSP	- 100 buku profil DPMPTSP	- 100 buku profil DPMPTSP
		- 1 paket Pemeliharaan /upgrade SIPMD	- 1 paket pemeliharaan SIPMD	- 1 paket pemeliharaan SIPMD
		- 1 baliho	- 14 cetak banner baliho	- 14 cetak banner baliho
		- 250 Cetak buku profil investasi	- 200 buku profil investasi	- 200 buku profil investasi
		- 1 paket proposal Keris Jateng	- 1 paket proposal Keris Jateng	- 1 paket proposal Keris Jateng
		- 1 rim cetak leaflet	-	-
		- 1 paket video pendek sosialisasi MPP	-	-
		- 2 paket video promosi	-	-
		- 2 paket penerbitan kolom di media cetak	-	-
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			

	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	- 5 kasus	- 10 kasus	- 9 kasus
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	- 1 kali rapat persiapan dan evaluasi Binwasdal	- 2 kali rapat persiapan evaluasi binwasdal	- 1 kali rapat persiapan evaluasi binwasdal
		- 70 kali pemantauan perusahaan	- 90 perusahaan yang dilakukan pemantauan	- 90 perusahaan yang dilakukan pemantauan
		- 100 perusahaan yg dilakukan pembinaan LKPM	- 50 perusahaan yang dilakukan pembinaan LKPM	- 50 perusahaan yang dilakukan pembinaan LKPM
		- 4 Kali rapat koordinasi dan sinkronisasi data PMA/PMDN	- 4 kali rapat pendataan PMA/PMDN	- 4 kali rapat pendataan PMA/PMDN
		- 9 kali bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha	- BinteK kepada 249 pelaku usaha	- BinteK kepada 377 pelaku usaha
		- 20 kali pengawasan (60 perusahaan)	- Pengawasan ke 435 perusahaan	- Pengawasan ke 444 perusahaan
			- Penyelesaian permasalahan dan hambatan kepada 9 pelaku usaha	- penyelesaian permasalahan dan hambatan kepada 110 perusahaan

Bidang Penanaman Modal melaksanakan 4 program dengan 4 kegiatan yaitu **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** dengan kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. **Program Promosi Penanaman Modal** dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. **Program Pelayanan Penanaman Modal** dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan kegiatan dengan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Program dan kegiatan tersebut bertujuan mendukung pencapaian sasaran daerah " Nilai Realisasi Investasi ". Dan dimaksudkan untuk meningkatkan realisasi investai PMDN maupun PMA yang ada di Jepara.

Program dan kegiatan ini untuk mencapai indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMDN , Nilai Investasi PMA.

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Telah mencapai tolok ukur keberhasilan yaitu 1 dokumen RUPM, 100 buku profil DPMPSTSP, 1 paket pemeliharaan SIPMD, 14 cetak banner baliho, 200 buku profil investasi, 1 paket proposal Keris Jateng, menyelesaikan 9 kasus pengaduan, 1 kali rapat evaluasi binwasdal, 90 perusahaan yang dilakukan pemantauan, 50 perusahaan yang dilakukan pembinaan LKPM, 4 kali rapat pendataan PMA/PMDN, bintek kepada 377 pelaku usaha, pengawasan ke 444 perusahaan, penyelesaian permasalahan dan hambatan kepada 110 perusahaan.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

1. Meningkatnya kesadaran para pelaku usaha pentingnya bintek yang diselenggarakan DPMPSTSP.
2. Pelaksanaan kegiatan pemantauan perusahaan dilakukan dengan mendatangi ke perusahaan / pelaku usaha.

Tabel 2.4
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT
TAHUN 2021 DAN 2022

NO	JENIS KEGIATAN	TH. N-3 (2021)	TH.N-2 (2022)	
			Target	Realisasi
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen perencanaan dan evaluasi 6 dokumen	- Dokumen perencanaan dan evaluasi 10 dokumen	- Dokumen perencanaan dan evaluasi 10 dokumen
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan
3.	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	- In house training - Surveillance	- In house training - Surveillance - Bintek SDM kepada 25 pegawai	- In house training - Surveillance - Bintek SDM kepada 25 pegawai
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan

NO	JENIS KEGIATAN	TH. N-3 (2021)	TH.N-2 (2022)	
			Target	Realisasi
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 PC All In One, 3 scanner, 2 printer, 1 dispenser	- 3 set kursi tunggu - 14 kursi rapat - 6 kursi staf puter - 2 rambu2 - 3 printer - 2 AC - 2 meja computer - 2 set kursi teras - 1 kursi putar tanpa sandaran - 1 scanner - 1 laptop - 1 tab - 1 UPS - 1 sprayer	- 3 set kursi tunggu - 14 kursi rapat - 6 kursi staf puter - 2 rambu2 - 3 printer - 2 AC - 2 meja computer - 2 set kursi teras - 1 kursi putar tanpa sandaran - 1 scanner - 1 laptop - 1 tab - 1 UPS - 1 sprayer
6.	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan
7.	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan

Sekretariat melaksanakan 1 program dan 7 Kegiatan. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan kegiatan (1) Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah; (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Program dan kegiatan Sekretariat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dan sesuai mendukung tujuan dan sasaran daerah RPJMD 2017-2022, yaitu meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang professional serta peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks RPD 2023 - 2026 program dan kegiatan tersebut bertujuan mendukung pencapaian tujuan "Mewujudkan kota yang maju, modern dan berkelanjutan". Program dan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik Perangkat Daerah yang mendukung kota maju, modern dan berkelanjutan.

Program dan kegiatan ini untuk mencapai indikator Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai hasil Penilaian SAKIP OPD, Persentase serapan anggaran, serta persentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan sesuai standart.

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara telah mencapai tolok ukur keberhasilan yaitu kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah dan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan tersebut adalah : (i) adanya dukungan pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama untuk pelayanan umum/publik (ii) adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang-bidang dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, (iii) adanya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik di OPD yang memadai, (iv) komitmen sumber daya manusia yang tinggi dalam menerapkan budaya kerja / core value ASN yaitu Berakhlak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara mempunyai Indikator Tujuan Nilai Realisasi Investasi dan indikator sasaran Jumlah LKPM yang masuk yang didukung oleh satu (1) program yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, di kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, serta (3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Modal.

Dari tabel dibawah ada beberapa Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran dan ada yang melebihi target yang telah direncanakan, tapi sebagian besar Pencapaian kinerja sudah sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang telah direncanakan, bahkan ada yang melebihi dari target.

2.1.1 Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

1. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

2.1.2 Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

4. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.1.3 Realisasi prog/keg yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yg direncanakan

1. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja prog/keg

- Faktor – faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja antara lain:

- Pengaduan bersifat insidentil, maka akan ditindaklanjuti setelah adanya pengaduan dari masyarakat, baik lewat online maupun secara langsung
- Faktor – faktor penyebab terpenuhinya target kinerja yang melebihi target yang sudah ditentukan antara lain :
 - Banyaknya masyarakat yang mengajukan legalitas izin
 - Sosialisasi perizinan dilaksanakan lewat zoom meeting
 - Adanya dukungan anggaran lewat DAK, sehingga bisa dipergunakan untuk binwasdal ke perusahaan/pelaku usaha di Kabupaten Jepara.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD

- Implikasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan :
 - Semakin sedikit pengaduan masyarakat semakin baik/bagus layanan perizinan yang diterima oleh masyarakat
- Implikasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan :
 - Semua target kinerja di DPMPTS bisa terpenuhi sesuai rencana
 - Semua kegiatan DPMPTS dapat diterima oleh masyarakat yang berkaitan dengan layanan perizinan
- Implikasi program/keg yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yg direncanakan :
 - Warga masyarakat banyak yang terfasilitasi perizinan
 - Masyarakat banyak yang sudah memiliki legalitas izin
 - Masyarakat sudah banyak yang melakukan laporan LKPM
 - Program sosialisasi layanan perizinan dapat diterima oleh masyarakat

2.1.6 Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

- Peningkatan jaringan sistem dari pusat
- Penyusunan peta potensi investasi di Jepara
- Peningkatan sosialisasi perizinan kepada masyarakat
- Peningkatan pendampingan bagi pelaku usaha
- Penambahan personil di DPMPTSP untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Tabel 2.5
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023 (N - 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun 2022 (N - 2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (Th Berjalan / N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Th 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*
PENANAMAN MODAL										
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Rp. 681.000.000.000	9.542.903.010.791	116.000.000.000	1.793.145.156.363	1.545,81	120.000.000.000	11.456.048.167.154	100
		Nilai Realisasi Investasi PMA	US\$. 397.000.000	3.929.551.038	70.000.000	408.220.277,59	583	72.000.000	4.409.771.315,59	100
1	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	375 perusahaan	214 perusahaan	-	-	-	-	-	-
2	Pemeliharaan jaringan LAN dan website	Jumlah website yang terupdate dan terpelihara	1 konten web	1 konten web	-	-	-	-	-	-
3	Penyusunan Buku Profil Investasi	Jumlah buku profil investasi	2.500 buku	1.000 buku	-	-	-	-	-	-
4	Promosi Investasi	Jumlah event/keikutsertaan pameran investasi	12 kali pameran nasional, 1 kali regional	4 kali nasional, 3 regional, 1 proposal Keris Jateng, 1 pembuatan baliho	-	-	-	-	-	-
5	Binwasdal Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan	525 perusahaan	280 perusahaan	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*
6	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah investor yang terfasilitasi instansi terkait yang dinamis	40 investor, 4 kali machmaking	24 investor, 1 kali fasilitasi (FGD)	-	-	-	-	-	-
7	Penyusunan dan Pemeliharaan Base Perizinan	Jumlah aplikasi perizinan yang terupdate dan terpelihara	1 aplikasi	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-
8	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	Jumlah buku profil DPMPTSP, spot radio, leaflet, baliho	1.200 buku, 1 sport radio, 6 leaflet,	440 buku, 1 sport radio, 6 leaflet, 8 pembuatan baliho, 1 kamera, 1 drone	-	-	-	-	-	-
9	Penyelenggaraan Perizinan Dasar	Jumlah rapat dan koordinasi serta cheking lokasi	220 rapat tim teknis, 1.000 cheking perizinan dasar	94 rapat tim teknis, 359 cheking perizinan dasar	-	-	-	-	-	-
10	Penyelenggaraan Perizinan Usaha	Jumlah rapat dan koordinasi serta cheking lokasi	288 kali koordinasi tim perizinan usaha, 510 kali cheking perizinan usaha	66 rapat tim teknis, 119 cheking	-	-	-	-	-	-
11	Pemeliharaan Software Back Up Data Dokumen Perijinan dan Back Up Data Dokumen Perijinan	Jumlah dokumen yang di back up	5.200 dokumen	5.200 dokumen	-	-	-	-	-	-
12	Lanjutan Sertifikasi ISO 9001 - 2015	Jumlah sertifikat ISO 9001-2015	1 sertifikat ISO	1 sertifikat ISO	-	-	-	-	-	-
13	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah	Jumlah aplikasi informasi penanaman modal daerah yang terpelihara	1 aplikasi	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-
14	Pendataan perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Jepara	Jumlah Data PMA/PMDN di Kabupaten Jepara	Data PMA/PMDN di Kabupaten Jepara	Data PMA/PMDN di Kabupaten Jepara	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*
II	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja		98.890	-	-	-	-	-	-
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan, bintek maupun workshop	30 orang	9 Orang	-	-	-	-	-	-
III	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Serapan Anggaran	100	100	-	-	-	-	-	-
		Nilai LPPD	Sangat Memuaskan							
1	Perencanaan dan Evaluasi DPMPTSP	Jumlah Dokumen : 1 POK, 1 Renja, 1 RKT, 1 RKA, 1 Laporan Keuangan, 1 LPPD dan LKPJ serta 1 LKJIP	Jumlah Dokumen : 1 POK, 1 Renja, 1 RKT, 1 RKA, 1 Laporan Keuangan, 1 LPPD dan LKPJ serta 1 LKJIP	Jumlah Dokumen : 1 POK, 1 Renja, 1 RKT, 1 RKA, 1 Laporan Keuangan, 1 LPPD dan LKPJ serta 1 LKJIP	-	-	-	-	-	-
IV	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	-	-	-	-	-	-
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan	Jumlah kasus penanganan pengaduan yang terfasilitasi	18 kasus	14 kasus	-	-	-	-	-	-
V	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	-	-	-	-	-	-
1	Pelayanan Teknis Kantor DPMPTSP Kab. Jepara	Terpenuhinya kebutuhan kantor guna peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*
VI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana	100	100	-	-	-	-	-	-
1	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Penanaman Modal dan Pelayanan	Terpenuhinya peralatan kantor	1 paket	1 paket	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022 / N - 2)			Target Program & Kegiatan Renja Tahun 2023 (N - 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun 2022 (N - 2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*
	PENANAMAN MODAL									
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA	US\$. 397.000.000	US\$ 4.337.771.316 (Rp. 58.559.912.766.000)	US\$ 72.000.000	US\$ 698.117.793,01 (Rp. 9.424.590.205.635)	969,61	Rp. 3.000.000.000.000	Rp. 70.984.502.971.635	100
2 18 02 201	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*
2	18	02	201	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas kemudahan perizinan perizinan kerjasama	- 11 kali fasilitasi - 2 kali FGD - 2 kali Machmaking pengusaha besar dengan UMKM - 10 investor terfasilitasi	- 1 kali fasilitasi perizinan - 1 kali machmaking kerjasama - 1 kali Focus Group Discussion (FGD) - 5 investor terfasilitasi	- 10 kali fasilitasi perizinan - 1 kali FGD PMA, PMDN - 5 investor terfasilitasi - 1 kali kerjasama /matchmaking UMKM, pengusahaan besar, Perbankan	- 10 kali fasilitasi perizinan - 1 kali FGD PMA, PMDN - 5 investor terfasilitasi - 1 kali kerjasama /matchmaking UMKM, pengusahaan besar, perbankan	100	- 1 kali Kegiatan CJIBF	- 11 kali fasilitasi - 2 kali FGD - 2 Machmaking pengusaha besar dengan dengan UMKM - 10 investor terfasilitasi - 1 kali Kegiatan CJIBF	100
2	18	02	202		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota									
2	18	02	202	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen review RUPM	-	-	1 dokumen review RUPM	1 dokumen review RUPM	100	-	- 2 dokumen review RUPM	100
2	18	02	202	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	-	-	-	-	-	1 Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha	- 1 Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha	100
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA	US\$. 397.000.000	US\$ 4.337.771.316 (Rp. 58.559.912.766.000)	US\$ 72.000.000	US\$ 698.117.793,01 (Rp. 9.424.590.205.635)	969,61	Rp. 3.000.000.000.000	Rp. 70.984.502.971.635	100
2	18	03	201		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									

1					2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]*	11*
						Daerah dan buku Profil Investasi	- 1 paket pemeliharaan SIPMD - 90 buku profil DPMPTSP	- 1 paket pemeliharaan SIPMD - 90 buku profil DPMPTSP	- 1 paket pemeliharaan SIPMD - 14 cetak banner baliho	- 1 paket pemeliharaan SIPMD - 14 cetak banner baliho			- 1 paket pemeliharaan SIPMD - 190 buku profil DPMPTSP - 14 cetak banner baliho	
2	18	03	201	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil investasi dan proposal proyek profil	- 250 buku profil investas i - 1 paket Proposal Keris Jateng	- 250 Cetak buku profil investasi - 1 paket proposal Keris Jateng	- 200 buku profil investasi - 1 paket proposal Keris Jateng	- 200 buku profil investasi - 1 paket proposal Keris Jateng	100	- 1 Dokumen Paket Penelitian Keris Jateng	- 450 Cetak buku profil investasi - 3 paket proposal Keris Jateng	
							- 1 paket video pendek sosialisasi MPP - 2 paket video promosi - 2 paket penerbitan kolom di media cetak	- 1 paket video pendek sosialisasi MPP - 2 paket video promosi - 2 paket penerbitan kolom di media cetak					- 1 paket video pendek sosialisasi MPP - 2 paket video promosi - 2 paket penerbitan kolom di media cetak	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA	US\$. 397.000.000	US\$ 4.337.771.316 (Rp. 58.559. 912.766.000)	US\$ 72.000.000	US\$ 698.117.793, 01 (Rp. 9.424. 590.205.635)	969,61	Rp. 3.000.000.000 .000	Rp. 70.984.502.971 .635	100
2	8	04	201		PelayananPerizina ndan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
2	18	04	201	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah rapat dan koordinasi perizinan usaha/dasar	- 24 kali rapat perizinan dasar	- 37 kali rapat perizinan dasar	- 30 kali rapat perizinan usaha	- 33 kali rpt perizinan usaha	105,12	1300 pelaku usaha	- 70 kali rapat perizinan usaha	100

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*
					berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		- 44 kali cheking perizinan dasar - 24 kali rapat perizinan usaha	- 44 kali cheking perizinan dasar - 38 kali rapat perizinan usaha	- 44 kali cheking perizinan usaha - 30 kali rapat perizinan dasar	- 44 kali cheking perizinan usaha - 31 kali rpt perizinan dasar			- 88 kali cheking perizinan usaha - 69 kali rapat perizinan dasar	
							- 28 kali cheking perizinan usaha - 2 kali bintek	- 44 kali cheking perizinan usaha - 3 kali bintek	- 45 kali cheking perizinan dasar - 7 kali gerai layanan di kecamatan	- 45 kali cheking perizinan dasar - 11 kali gerai layanan di kecamatan			- 89 kali cheking perizinan dasar - 11 kali gerai layanan di kecamatan - 3 kali bintek - 1300 pelaku usaha berizin	
2	18	04	201	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah penanganan pengaduan yang terfasilitasi	10 pengaduan	5 pengaduan	10 pengaduan	9 pengaduan	90	5 kasus	19 pengaduan	100
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA	US\$. 397.000.000	US\$ 4.337.771.316 (Rp. 58.559.912.766.000)	US\$ 72.000.000	US\$ 698.117.793,01 (Rp. 9.424.590.205.635)	969,61	Rp. 3.000.000.000.000	Rp. 70.984.502.971.635	100
2	18	05	201		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2	18	05	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan ke perusahaan	- 1 kali rapat - 100 perusahaan - 70 kali pemantauan	- 1 kali rapat persiapan dan evaluasi Binwasdal - 70 kali pemantauan perusahaan	- 2 kali rapat persiapan - 90 perusahaan yang dilakukan pemantauan	- 1 kali rapat persiapan dan evaluasi Binwasdal - 90 perusahaan yg dilakukan pemantauan	100	- 25 perusahaan pemantauan	- 2 kali rapat persiapan dan evaluasi Binwasdal - 185 perusahaan yg dilakukan pemantauan	100

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*
								- 100 perusahaan yg dilakukan pembinaan LKPM					- 100 perusahaan yang dilakukan pembinaan LKPM	
2	18	05	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pembinaan ke perusahaan	- 4 kali rapat koordinasi dan sinkronisasi data PMA/PMDN 8 kali bintek/sosialisasi kemudahan berusaha	- 4 Kali rapat koordinasi dan sinkronisasi data PMA/PMDN 9 kali bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha	- 4 kali rapat pendataan PMA/PMDN - 50 perusahaan yang dilakukan pembinaan LKPM - Bintek ke 249 pelaku usaha - Penyelesaian permasalahan dan hambatan kepada 9 pelaku usaha	- 4 kali pendataan PMA/PMDN - 50 perusahaan yang dilakukan Pembinaan LKPM - Bintek ke 377 pelaku usaha - 110 perusahaan penyelesaian hambatan	173,4	- 50 pelaku usaha pembinaan LKPM - 249 pelaku usaha bintek/sosialisasi - 9 pelaku usaha penyelesaian permasalahan	- 4 kali rapat koordinasi dan sinkronisasi data PMA/PMDN - 9 kali bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha - 2 kali pendataan - 175 pembinaan LKPM perusahaan - Bintek ke 626 pelaku usaha - 25 perusahaan penyelesaian hambatan	100
2	18	05	201	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengawasan ke perusahaan	- 13 kali pengawasan (39 perusahaan)	- 20 kali (60 perusahaan)	- 435 pengawasan perusahaan	- 444 pengawasan perusahaan	102,1	- 50 pelaku usaha	- 554 pelaku usaha	100
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA	US\$. 397.000.000	US\$ 4.337.771.316 (Rp. 58.559.912.766.000)	US\$ 72.000.000	US\$ 698.117.793,01 (Rp. 9.424.590.205.635)	969,61	Rp. 3.000.000.000.000	Rp. 70.984.502.971.635	100

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*
2	18	06	201	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	18	06	201	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi yang terpelihara	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100	- 1 Pemeliharaan aplikasi	- 3 Pemeliharaan aplikasi	100
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Serapan Anggaran	100 %						
2	18	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi yang tersusun							
2	18	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, RKT (2)		2 dokumen	2 dokumen	100	3 dokumen	5 dokumen	100
2	18	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-RKPD	Jumlah dokumen RKA (1)		1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	100
2	18	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan (1)		1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	100

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*
2	18	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA (1)			1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	100
2	18	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan (1)			1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	100
2	18	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LkJP (1)			1 dokumen	1 dokumen	100	3 laporan	5 laporan	100
2	18	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen POK, Laporan Keuangan, LPPD & LKJP (3)			3 dokumen	3 dokumen	100	-	3 dokumen	100
2	18	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2	18	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2	18	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kebutuhan pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2	18	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2	18	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Sertifikat ISO	1 Sertifikat ISO	1 Sertifikat ISO	1 Sertifikat ISO	100	1 Sertifikat ISO	1 Sertifikat ISO	100
2	18	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dministrasi Umum Perangkat Daerah								

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*
2	18	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2	18	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2	18	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2	18	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2	18	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	18	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2	18	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	18	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	-
2	18	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2	18	01	208	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100

1					2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*
2	18	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2	18	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	18	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kend. Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2	18	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2	18	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2	18	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2	18	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara tahun 2024 tidak terkait secara langsung dengan NSPK maupun SPM. Bagian ini menyajikan kajian capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara adalah Realisasi Investasi sebagai berikut :

Tabel 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Peranngkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
1	Realisasi Investasi PMDN	-	IKU	116.000.000.00 0	120.000.000.00 0	3.000.000.000.0 00	3.075.000.000.0 00	1.793.145.156.3 63	160.736.900.00 0	3.000.000.000.0 00	3.075.000.000.0 00	
2	Realisasi PMA	-	IKU	US \$ 70.000.000	US \$ 72.000.000	-	-	US \$ 408.220.278	US \$ 698.117.793,01	-	-	
3	Tenaga Kerja	-		21.790 orang	21.800 orang	-	-	49.457 orang	26.013 orang	-	-	

Dari tabel 2.6 tersebut di atas, indikator Realisasi Investasi PMDN Realisasi PMA dan Tenaga Kerja mencapai target bahkan melebihi target.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator tersebut yaitu adanya pembinaan, pemantauan dan pengawasan secara langsung ke pelaku usaha, serta sosialisasi dan bintek LKPM kepada pelaku usaha yang ada di kabupaten Jepara.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kabupaten Jepara

2.3.1 Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2022 target Realisasi Investasi PMDN Rp. 120.000.000.000 dengan realisasi Rp. 160.736.900.000,- dengan prosentase sebesar 133,95 %. Target Realisasi PMA US \$ 72.000.000 dengan realisasi US \$ 698.117.793,01 dengan prosentase 969,61 %.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan PTSP
2. Belum adanya Peta Potensi dan Peluang Usaha
3. Belum optimalnya pelaku usaha dalam menyampaikan laporan LKPM
4. Kurangnya SDM yang berkompetensi dalam melakukan pelayanan
5. Belum semua aplikasi perizinan terintegrasi

Hambatan yang di hadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi antar OPD dalam mendukung kegiatan pelayanan penanaman modal dan perizinan.
2. Belum dirumuskan draft peta potensi investasi di Jepara
3. Kurangnya Kesadaran pelaku usaha PMA dan PMDN untuk membuat Laporan Investasi secara berkala
4. Kurangnya tenaga ahli yang professional pada Pelaku Usaha PMA dan PMDN
5. Belum optimalnya SDM di pelayanan PTSP dan Penanaman modal yang memiliki kompetensi teknis

6. Masih berjalannya kegiatan pelayanan perizinan ada di masing-masing OPD
7. Masih adanya sistem yang sering eror

2.3.3 Dampaknya bila permasalahan tidak terselesaikan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah :

- 1 Realisasi investasi di Jepara tidak bisa sesuai target.
- 2 Peta potensi belum tersedia akan menyebabkan calon investor tidak mengetahui di sektor apa saja yang berpeluang untuk menanamkan investasinya.
- 3 Bila pelaku usaha tidak menyampaikan laporan LKPM, tidak diketahui seberapa besar investor menanamkan modalnya di Kabupaten Jepara.
- 4 Kurangnya SDM yang berkualitas akan mempengaruhi pelayanan perizinan.
- 5 Perizinan belum integrasi bisa menyebabkan terhambatnya dalam proses perizinan.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya
2. Belum terintegrasinya sistem Informasi Layanan Perizinan dengan baik
3. Masih adanya sistem yang sering eror
4. Adanya Pelaku usaha PMA dan PMDN yang tidak diketahui keberadaannya
5. Kurang optimalnya Pelaku Usaha PMA dan PMADN dalam menyampaikan kewajiban Laporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

Dalam rangka mengakselerasi perekonomian di Kabupaten Jepara selain melihat pada kekuatan yang ada juga wajib mengetahui celah atau peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan

strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta menjadi daya tarik calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Jepara.

Adapun peluang-peluang yang mampu dimanfaatkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara antara lain sebagai berikut :

1. Telah didelegasikannya sebagian besar kewenangan bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
2. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah yang memungkinkan untuk meningkatkan usaha para investor di Kabupaten Jepara.
3. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal.
4. Iklim investasi yang berkembang cukup baik di Kabupaten Jepara;
5. Adanya pembinaan yang diberikan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perijinan dengan lebih mudah dan cepat.

2.3.5 Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Isu – isu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara adalah :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan PTSP;
2. Belum adanya Peta Potensi dan Peluang Usaha;
3. Belum optimalnya pelaku usaha dalam menyampaikan laporan LKPM.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan awal RKPD untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 setelah dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan pelayanan SKPD mengalami perubahan dalam beberapa hal. Pertimbangan yang digunakan untuk melakukan penyesuaian rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan antara lain: (1) ketersediaan pagu anggaran; (2) capaian target kinerja; (3) amanat prioritas dari K/L.

Penyusunan rancangan ahir RKPD ini terdapat beberapa perbedaan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Adanya perbedaan di pengurangan pagu anggaran di beberapa sub kegiatan
2. Dalam rankhir terdapat pemutakhiran, sehingga beberapa sub kegiatan ada perubahan nama sub kegiatan

Berikut disajikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.7
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPMPSTP KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.428.139.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.742.146.000	
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	89,5	5.417.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	89,5	4.089.326.000	
2	1	0	2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencan	7 dokumen	38.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	7 dokumen	18.000.000	
2	1	0	20	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	17.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	11.000.000	
2	1	0	20	0		Koordinasi dan Penyusunan SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	
2	1	0	20	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	17.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	6.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2,		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 dokumen	3.630.000.000	Administrasi Keuangan perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	3 dokumen	2.960.207.000	
2	1	0	20	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jepara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	3.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jepara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	2.837.207.000	
2	1	0	20	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	130.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	123.000.000	
2	1	0	2,		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 dokumen	600.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	3 dokumen	54.300.000	
2	1	0	20	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Jepara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 orang	600.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Jepara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 orang	54.300.000	
2	1	0	2,		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 dokumen	382.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	4 dokumen	252.569.000	
2	1	0	20	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	90.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	32.000.000	
2	1	0	20	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jepara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	17.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jepara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	
2	1	0	20	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Jepara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Jepara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	20.000.000	
2	1	0	20	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	225.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	193.869.000	
2	1	0	2,		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 paket	358.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	36.000.000	
2	1	0	20	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	1 laptop, 1 printer, 1 AC, 1 PC, 1 scanner, 1 proyektor, 1 mobil dinas, 1 roll o'pack, 1 kursi tamu	358.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 roll o'pack	36.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2,		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	12 laporan	249.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 laporan	657.900.000	
2	1	0	20	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	27.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	2.400.000	
2	1	0	20	0	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	32.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	15.000.000	
2	1	0	20	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	190.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	640.500.000	
2	1	0	2,		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 unit	160.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	60 unit	110.050.000	
2	1	0	20	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jepara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jepara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	19 unit	56.550.000	
2	1	0	20	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jepara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	17.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jepara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	8.000.000	
2	1	0	20	0	Pemeliharaan Mebel	Kab. Jepara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	11.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Jepara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	7.500.000	
2	1	0	20	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	22.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	15.000.000	
2	1	0	20	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Kab. Jepara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	23 unit	35.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Kab. Jepara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	23 unit	23.000.000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
2	1	0		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi	51%	119.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi	51%	35.000.000	
2	1	0	2, 01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah investor yang terfasilitasi	25 pelaku usaha	75.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi	25 pelaku usaha	10.000.000	
2	1	0	20 0	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Jepara	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di Daerah	2 kegiatan usaha	75.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Jepara	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5 dokumen	10.000.000	
2	1	0	2, 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah RUPM yang tersusun	1 dokumen	44.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen investasi yang tersusun	1 dokumen	25.000.000	
2	1	0	20 0	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	1 dokumen	44.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.000.000	
2	1	0	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Pertumbuhan promosi penanaman modal	4,5 %	296.246.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Pertumbuhan promosi penanaman modal	4,5 %	55.000.000	
2	1	0	2, 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis promosi penanaman modal	3 dokumen	296.246.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Jenis Promosi Penanaman Modal	3 dokumen	55.000.000	
2	1	0	20 0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	3 dokumen	296.246.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	55.000.000	
2	1	0	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penyelesaian izin	76%	717.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Penyelesaian Izin	76%	46.920.000	
2	1	0	2, 01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang dilakukan cheking	1.400 dokumen	717.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan Jumlah Izin dan Non izin yang diterbitkan	1.400 dokumen	46.920.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	20	0	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Jepara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.400 pelaku usaha	706.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jepara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.400 pelaku usaha	40.920.000	
2	1	0	20	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Jepara	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 orang	11.000.000	Penyediaan dan pengelolaan layanan perizinan berbasis risiko	Kab. Jepara	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 pelaku usaha	6.000.000	
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Prosentase kepatuhan pelaku usaha dalam laporan LKPM	80 %	539.393.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Prosentase kepatuhan pelaku usaha dalam laporan LKPM	80 %	475.900.000	
2	1	0	2	01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	160 pelaku usaha	539.393.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan binausaha	160 pelaku usaha	475.900.000	
2	1	0	20	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Jepara	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	100 kegiatan usaha	25.000.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Jepara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9 Kegiatan Usaha	12.205.000	
2	1	0	20	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Jepara	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	160 pelaku usaha	350.189.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Jepara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	313 Pelaku Usaha	337.695.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	20	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Jepara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	80 kegiatan usaha	164.204.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Jepara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	85 Kegiatan Usaha	126.000.000	
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase izin dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	70 %	339.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase izin dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	70 %	40.000.000	
2	1	0	2,		<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah pengelolaan data dan informasi</i>	<i>1.400 dokumen</i>	<i>339.000.000</i>	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah pengelolaan data dan informasi Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi</i>	<i>1.400 dokumen</i>	<i>40.000.000</i>	
2	1	0	20	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Jepara	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1.400 dokumen	339.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jepara	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1.400 dokumen	40.000.000	
TOTAL									7.428.139.000	TOTAL				4.742.146.000	

2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara “*top down & bottom up*”. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Diantara keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah dengan diadakannya Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan membantu pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara serta keterbatasan pagu anggaran, maka dilakukan memilih dan memilah berdasar urutan prioritas pendukung pencapaian indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan se- Kabupaten Jepara yang dihadiri oleh LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten serta pelaksanaan pada forum PD tidak ada usulan usulan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Jepara

Nama: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jepara

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi (Desa/Dukuh/RT/ RW)	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu:

1. Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal
2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Arah kebijakan pertama : Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7 - 6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPMPTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.

2. Arah kebijakan kedua : Peningkatan Penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal

(PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Kebijakan nasional berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024 yang berdampak pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Penyederhanaan Regulasi
3. Penyederhanaan Birokrasi

Implementasi kebijakan Nasional tersebut pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 yaitu meningkatkan Nilai Realisasi Investasi melalui pelaksanaan 5 (lima) Program yaitu : (i) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, (ii) Program Promosi Penanaman Modal (iii) Program Pelayanan Penanaman Modal, (iv) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan (v) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Kebijakan pembangunan nasional tahun 2020 -2024 tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara di Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Di Bidang Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP), memberikan sosialisasi dan pelayanan/pendampingan perizinan dengan aplikasi JOSS guna membantu pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas izin.
2. Di Bidang Penanaman Modal, memberikan informasi terkait Penanaman modal di Jepara, memberikan pembinaan LKPM kepada pelaku usaha.

Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sesuai RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Jawa Tengah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Prioritas provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yang perlu dipertimbangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara adalah pada tahapan Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik(*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring, dengan focus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pemantapan sistem budaya kerja aparatur yang berkualitas, profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
3. Pemantapan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
4. Pemantapan kerja sama dan kemitraan strategis pada seluruh sector pembangunan dengan tetap berbasis jati diri budaya masyarakat Jawa Tengah dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Jepara, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Jepara, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Jepara telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah. RKPD Kabupaten Jepara tahun 2024 mengambil

tema "Peningkatan Ketahanan Sosial, Pembangunan Kebudayaan, dan Pertumbuhan Perekonomian" dengan prioritas:

1. Meningkatkan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (social order) masyarakat di desa.
2. Penguatan moderasi beragama dalam rangka meningkatkan harmoni sosial dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat.
3. Meningkatkan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah.

Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, maka prioritas Kabupaten Jepara yang akan dijabarkan dalam renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara. Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dengan
Prioritas Renja OPD Dinas DPMPSTP Kabupaten Jepara
Tahun 2024

Prioritas Nasional/Provinsi/Kota	Prioritas Renja OPD 2024
Prioritas Nasional	
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia	-
2. Penyederhanaan Regulasi	-
3. Penyederhanaan Birokrasi	-
Prioritas Provinsi Jawa Tengah	
1. Perwujudan kualitas pelayanan	1. Meningkatkan pelayanan perizinan
	2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan perizinan
	3. Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat
	4. Meningkatkan penyediaan data dan informasi Penanaman modal
2. Perwujudan kualitas promosi dan kerja sama Penanaman modal	1. Meningkatkan kualitas kajian potensi penanaman modal
	2. Meningkatkan promosi penanaman modal yang inovatif
	3. Meningkatkan kerjasama Penanaman modal (antar usaha besar dan antar usaha besar denan UKM)
3. Perwujudan percepatan pelaksanaan berusaha	Peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan berusaha
4. Perwujudan pelaksanaan Penanaman modal yang berwawasan lingkungan	Peningkatan fasilitasi pengembangan Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment)
Prioritas Kabupaten Jepara	

Prioritas Nasional/Provinsi/Kota	Prioritas Renja OPD 2024
1. Optimalisasi Proses Investasi	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang diarahkan untuk meningkatkan Jumlah Proyek (PMDN/PMA) yang melalui OSS RBA 2. Program Promosi Penanaman Modal yang diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan promosi penanaman modal, Program Pelayanan Penanaman Modal yang diarahkan untuk pelayanan izin 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam laporan LKPM dan 4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang diarahkan untuk meningkatkan Jumlah izin yang diterbitkan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

Tabel 3.2
 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP
 Kabupaten Jepara Tahun 2024

Tujuan Renstra tahun 2023 s/dth 2026	Sasaran Renstra Tahun 2023 s/d 2026	Isu-isu Penting dan Prioritas 2024	Tujuan Renja Tahun 2024	Sasaran Renja Tahun 2024
2	3	4	5	6
Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan PTSP	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan PTSP
		Belum adanya Peta Potensi dan Peluang Usaha		Belum adanya Peta Potensi dan Peluang Usaha
		Belum optimalnya pelaku usaha dalam menyampaikan laporan LKPM		Belum optimalnya pelaku usaha dalam menyampaikan laporan LKPM

3.3 Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi disektor pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara sejak tanggal 1 Oktober 2021 telah menerapkan dan melaksanakan Perizinan Non Berusaha Secara Online melalui aplikasi JOSS (*Jepara Online Smart Service*), dimana masyarakat selaku penerima layanan bisa mengakses melalui laman/web: joss.jepara.go.id. JOSS melayani sebanyak 74 jenis perizinan.

Adapun keunggulan Aplikasi JOSS adalah :

1. Dapat diakses dimanapun tanpa harus datang ke MPP Jepara/ DPMPTSP Kabupaten Jepara
2. *Paperless*, dokumen yang dipersyaratkan berbentuk pdf dan bisa langsung diupload di aplikasi JOSS
3. *Tracking online* (sistem pelacakan secara online)
4. Tanda Tangan Digital (TTE)
5. Produk perizinan terjamin keamanannya (menggunakan barcode)
6. Gratis, mudah, cepat dan transparan
7. *WhatsApp* (WA) notifikasi, ada pemberitahuan ke pemohon melalui nomor WA
8. SK digital dapat dicetak secara mandiri

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024, didasarkan pada beberapa pendekatan dan penyelarasan sebagaimana tertuang dalam bab III dokumen ini.

4.1 Program dan Kegiatan

Perumusan Program dan Kegiatan Renja tahun 2024 mempertimbangkan amanat prioritas nasional, provinsi, dan Kabupaten Jepara tahun 2024 dikaitkan dengan tugas dan fungsi PD dalam rangka mencapai visi, misi, Tujuan, sasaran daerah dalam RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

4.1.1 Faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap rumusan dan program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara tahun 2024 adalah:

1. Tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara yaitu 1). Tujuan : "Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi" dengan sasaran "Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi", 2). Tujuan : "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah" dengan sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah".
2. Tema pembangunan tahun 2024 Kabupaten Jepara : Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan Didukung Pertumbuhan Ekonomi dan Sarana Prasarana Dasar Berkelanjutan.
3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara tahun 2024 :
 - Peningkatan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (*social order*) masyarakat di desa
 - Penguatan moderasi beragama dan sosial dalam rangka meningkatkan harmoni sosial dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat

- Peningkatan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah
 - Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah
 - Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
4. Pencapaian SDGs, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara mendukung pencapaian Pilar Lingkungan dengan tujuan 14 (Melakukan konservasi dan pemantauan sumber daya laut, samudra dan maritime untuk pembangunan yang berkelanjutan) dengan indikator nasional Persentase kepatuhan pelaku usaha, indikator provinsi Persentase kepatuhan pelaku usaha
 5. Hasil DKT/Musrenbangcam : -
 6. Pokok Pikiran DPRD : -

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, Renja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 yang mengacu pada RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dan penjabaran RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024. Koneksitas kerangka program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dengan RKPD Kabupaten Jepara sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Keterkaitan Kerangka Program DPMPTSP
dengan Sasaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024

Sasaran RKPD (1)	Program dan Kegiatan Renja OPD (2)
Menguatnya Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing	I. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota II. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota III. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota IV. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota V. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
--	---

4.1.2 Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara akan melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 6 program yang terbagi dalam 13 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.742.146.000,- (Empat Milyard Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu), yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 4.324.746.000,- (Empat Milyard Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu) dan DAK sebesar Rp. 417.400.000 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Ribu), yang sebagian besar bersumber dari dana APBD Kabupaten Jepara.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PENANAMAN MODAL

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Kegiatan Indikatif :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kegiatan Indikatif :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan Indikatif :

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan Indikatif :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya
 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 - Pengawasan Penanaman Modal

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Kegiatan Indikatif :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Kegiatan Indikatif :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4.1.3 Penjelasan Jika Rumusan dan Kegiatan Tidak sesuai dengan Ranwal RKPD

Pada Rencana Awal Renja Tahun 2024 program, kegiatan dan sub kegiatan serta berdasarkan Renstra Tahun 2023 – 2026, sementara pada Rancangan akhir berdasarkan SIPD RI dan ada pemutakhiran nama – nama sub kegiatan beserta indikatornya sehingga banyak yang tidak sesuai pagu anggarannya

4.1.4 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 selengkapnya dalam table berikut :

Tabel 4.2
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. JEPARA TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL OMP OK SASA RAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERA BODRA T DAER AH PENA BAGU NO JAWA B	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						4.742.146.000,00							4.946.000.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.742.146.000,00							4.946.000.000,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						4.742.146.000,00							4.946.000.000,00		
1.	2.18.01	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-			89,5 %	4.089.326.000,00						-	4.278.000.000,00		
	2.18.01.2-01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	-			7 dokumen	18.000.000,00					1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	21.000.000,00	DPM PTSP
	2.18.01.2-01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggen 8	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		12.600.000,00	DPM PTSP
	2.18.01.2-01.0004	Koordinasi dan Penrusutan DPA-SKPD															

		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		2.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		7.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	-			3 dokumen	2.968.267,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	3.126.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.837.267,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		3.000.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	123.000.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		126.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	-			3 dokumen	54.300.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	56.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

			Jumlah Peserta Berdesain Tugas dan Penguji yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	54.300.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggajene	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		56.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administratif umum PD yang disusun	-			4 dokumen	252.869.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		258.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	32.000.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggajene	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		33.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggajene	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		6.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggajene	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		21.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	195.869.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggajene	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		196.000.000,00	DPM PTSP

2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			1 paket	36.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	36.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.07.0000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	36.000.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggon g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	36.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	-			12 laporan	657.900.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	654.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.400.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggon g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	2.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggon g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	16.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urus Kantor yang Disediakan				12 Laporan	640.500.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan bahan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		640.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	-				60 Unit	110.050.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan bahan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		110.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					19 Unit	58.550.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan bahan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		58.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan					19 Unit	8.000.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan bahan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		8.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.09.0003	Pemeliharaan Mebel															
		Jumlah Mebel yang Dipelihara					20 Unit	7.500.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan bahan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		8.000.000,00	DPM PTSP
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi					1 Unit	15.000.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan bahan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		16.000.000,00	DPM PTSP

2.18.01.2.09.0011	Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dirhabilitasi				23 Unit	23.000.000,00	- Kab. Jepara, Penggung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		24.000.000,00	DPM PTSP
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi	-			51 %	38.000.000,00							37.000.000,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi	-				25 Pelaku Usaha	10.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas. 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	11.000.000,00	DPM PTSP
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal															
			Jumlah Peraturan Daerah/Prosedur dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				5 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Jepara, Penggung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas. 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		11.000.000,00	DPM PTSP
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen investasi yang terasah	-				1 dokumen	25.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas. 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	26.000.000,00	DPM PTSP
2.18.02.2.02.0004	Pencusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Jepara, Penggung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas. 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-		26.000.000,00	DPM PTSP
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan promosi penanaman modal	-			4,5 %	65.000.000,00							67.000.000,00	

	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Merjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Promosi Penanaman Modal	-			3 Dokumen	55.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	57.000.000,00	DPM PTSP
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	55.000.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggipen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	57.000.000,00	DPM PTSP
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengeluaran lain	-			76 %	46.920.000,00					-	-	49.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Berbasis dan Non Perumahan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Merjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	-			1400 dokumen 1400 Dokumen	46.920.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	49.000.000,00	DPM PTSP
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perumahan Berbasis Risiko Sistem Perumahan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perumahan Berbasis Risiko Sistem Perumahan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1300 Pelaku Usaha	40.920.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggipen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	42.000.000,00	DPM PTSP
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perumahan berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perumahan Berbasis Risiko Sistem Perumahan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				5 Pelaku Usaha	6.000.000,00	- Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	7.000.000,00	DPM PTSP
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase keputusan pelaku usaha dalam laporan UKPM	-			80 %	475.900.000,00					-	-	483.000.000,00	

2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang diikutsertakan	-			160 Pelaku Usaha	475.900.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	483.000.000,00	DPM PTSP
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan usahanya														
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan usahanya				9 Kegiatan Usaha	12.205.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggreh	DANA TRANSFER KHUSUS-ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	14.000.000,00	DPM PTSP
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Peraturan Berusaha Berbasis Risiko dan Penguasaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				313 Pelaku Usaha	337.695.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggreh	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	340.000.000,00	DPM PTSP
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Diarsipkan dan Diunggah Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Diakses Inspeksi Lapangan ; serta Diakses Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				85 Kegiatan Usaha	126.000.000,00	- Kab. Jepara, Jepara, Panggreh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	129.000.000,00	DPM PTSP
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase lain dan non pertanian yang berbasis teknologi informasi	-		70 %	40.000.000,00						-	42.000.000,00	

2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan data dan informasi Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi	-			1400 dokumen 1400 Dokumen	40.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	42.000.000,00	DPM PTSP
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dikay dan Dimanfaatkan				1300Dokumen	40.000.000,00	- Kab. Jepara, Jepang, Panggreh	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	42.000.000,00	DPM PTSP
	J U M L A H						4.742.146,00 0,00							4.946.000.000 ,00	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memegang peranan penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di daerah, Renja tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara sangat berarti bila pelaksanaannya sesuai dengan target pencapaian baik anggaran maupun kinerja. Renja juga digunakan sebagai pengusulan anggaran dan kegiatan pada APBD Kabupaten, acuan dalam Penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024, sebagai dasar penentuan prioritas kegiatan dan plafon APBD, juga digunakan pelaksanaan kegiatan tahunan perangkat daerah dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024. Penyajian dokumen ini diharapkan dapat mencerminkan nuansa pemerataan pembangunan sesuai skala prioritas, dengan pengelolaan dan penanganan secara prioritas untuk mencapai hasil yang optimal sesuai anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan maupun kelompok masyarakat lainnya selain itu juga konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai program yang telah dirumuskan dalam Renja maupun pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

Diharapkan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara yang merupakan salah satu dokumen pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah mampu mengarahkan kebijakan dan program yang pencapaiannya sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dan untuk mewujudkannya diperlukan

dukungan dan peran serta/partisipasi masyarakat dari semua *stakeholder* dan atau semua pihak yang berkepentingan.

Diharapkan hasil pembangunan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat serta mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjaga efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan maka diperlukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Jepara, 20 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



HERY YULIYANTO, S.STP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770702 199602 1 001